



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**2025**

**DINAS SOSIAL KAB.JOMBANG**

Jalan Raden Wijaya No. 5 Jombang



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411  
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR: 100.3.3.7/408/415.20/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin keterpaduan Pembangunan tahunan, perlu disusun Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja) PD;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024-2026
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Perubahan Anggaran Kegiatan Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 25 Juni 2025

---

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JOMBANG



HARI PURNOMO, AP, M.E

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025** dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan pertama dari **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029**, yang disusun sebagai bagian integral dari tahapan awal pelaksanaan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2026**.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap dinamika kebijakan pembangunan, perubahan kebutuhan masyarakat, dan penyesuaian arah program prioritas nasional maupun daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan bidang sosial. Fokus utama perubahan diarahkan pada penguatan pelayanan kesejahteraan sosial yang menjangkau kelompok rentan, melalui program prioritas seperti **perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, dan fasilitasi Sekolah Rakyat**, yang merupakan bentuk inovasi layanan sosial berbasis komunitas.

Dokumen ini memuat penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja, target capaian, dan alokasi anggaran yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, serta mendukung capaian **Visi Bupati Jombang: “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”** Penyusunan dilakukan secara partisipatif melalui forum perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, serta analisis terhadap hasil pelaksanaan tahun sebelumnya.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan perubahan Renja ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang operasional dan akuntabel dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang secara adil dan berkelanjutan.

Jombang, 25 Juni 2025  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JOMBANG**



**HARI PURNOMO, AP, M.E**  
NIP. 19751110 199501 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                          | i             |
| DAFTAR ISI .....                                                                             | ii            |
| DAFTAR TABEL .....                                                                           | iii           |
| <br><b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                        | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang . .....                                                                  | 1             |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                    | 3             |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                 | 7             |
| 1.3.1 Maksud .....                                                                           | 7             |
| 1.3.2 Tujuan .....                                                                           | 8             |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                             | 8             |
| <br><b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>                  |               |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....                    | 15            |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                       | 30            |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Dinas Sosial Kabupaten Jombang..... | 38            |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                  | 48            |
| <br><b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>                                    |               |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....                                 | 49            |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....                                 | 57            |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                              | 59            |
| <br><b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....</b>                                     | <br><b>66</b> |
| <b>BAB V    PENUTUP .....</b>                                                                | <b>79</b>     |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                                                   |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 : | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029..... | 16 |
| Tabel 2.2 : | Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 .....                                                                            | 30 |
| Tabel 2.3 : | Pencapaian SPM bidang sosial sampai dengan Tribulan I tahun 2025.....                                                                             | 32 |
| Tabel 2.5 : | Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025.....                                    | 48 |
| Tabel 3.1 : | Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....                                                                                               | 52 |
| Tabel 4.1 : | Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial tahun 2025.....                                                                                          | 68 |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Hasil Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menuntut pemerintah daerah focus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada masa awal kepemimpinan kepala daerah terpilih, perangkat daerah wajib menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan (renja) dengan kebijakan baru yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah, yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan perubahan renja Dinas Sosial menjadi bagian penting dalam proses adaptasi terhadap arah pemangunan baru, dengan tahap mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja tahun berjalan, dinamika sosial yang berkembang, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, penyusunan perubahan renja Dinas Sosial tahun 2025 merupakan Langkah strategis untuk menjamin keterpaduan program dan kegiatan dengan prioritas Pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta untuk memastikan responsivitas dan relevansi pelayanan sosial terhadap kebutuhan masyarakat secara actual dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua” dan misi yang diampun oleh

Dinas Sosial adalah misi kesatu, yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Religius dan Berdaya Saing Global”.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturana-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6633)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Gender untuk Pemerintah Daerah)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatura Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 seri E)
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosal (Lembaran

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E)

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045
36. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E)
37. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/E)
38. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87/D)

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk menyesuaikan rencana program dan kegiatan tahun berjalan dengan dinamika dan perkembangan aktual, baik dari aspek kebijakan nasional/daerah, ketersediaan anggaran, perubahan asumsi makro, capaian kinerja, maupun kondisi sosial masyarakat yang berkembang. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah

dengan pelaksanaan tahunan, serta menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial..

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menyesuainakn target kinerja dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sbelumnya dan perkembangan terbaru
2. Menampung kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah pusat atau daerah yang berdampak langsung terhadap urusan sosial
3. Mengakomodasi pergeseran kegiatan dan prioritas anggaran termasuk penyesuaian terhadap sumber dana tambahan seperti DBHCHT
4. Memperkuat fokus dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Memberikan dasar perencanaan pelaksanaan dan penganggaran yang lebih akurat, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD tahun berjalan

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017, penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar subtransi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Tribulan I Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Tribulan II (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah



sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

### **2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan Perda dan Perbup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasarkan surat usulan perubahan, hasil evaluasi dan pengumpulan informasi PD, maupun hasil rapat koordinasi. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana perubahan usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian perubahan usulan tersebut

### **BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap perubahan kebijakan nasional dan provinsi dampai dengan triwulan II, khususnya yang menyangkut arah kebijakn dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

#### **3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD**

Perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan perubahan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD

### **3.3. Perubahan Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan :
  - Pencapaian target visi, misi dan indikator kinerja jangka menengah (IKU & IKD);
  - Pencapaian SDGs;
  - Pengentasan kemiskinan;
  - Pencapaian SPM;
  - Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis;
  - Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah (Penanganan Wabah PMK, Percepatan Infrastruktur, Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata);
  - Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan;
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
  - Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos/gaji/TPP isajikan dalam tabel form lampiran 3.

Penambahan penjelasan jika rumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis

program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB I V    PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II** **HASIL EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Tribulan II dan Capaian Renstra PD**

Secara umum pada tahun 2025, Dinas Sosial melaksanakan satu urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dengan menyelenggarakan 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan.

Dinas Sosial pada tahun 2025 mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 25.172.214.207 dan terealisasi sebesar Rp. 3.636.066.814 atau 14,44%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025**  
**Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang**

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                                                                  | Satuan  | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |   | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota                            | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                                                                                                                          | persen  |                                                              | 0 |                                                            | 0             | 100                                                                                  | 5.119.470.909 | 100                                                                               | 1.396.633.201 | 98                                                                  | 37,44 | 198                                                   |               | 100                                                                 | 100 |
| Kegiatan perencanaan, pengangara, dan evaluasi kinerja perangkat daerah               | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan                                                                       | persen  |                                                              | 0 | 100                                                        | 103.200.464   | 100                                                                                  | 108,289.950   | 42,8                                                                              | 3.197.500     | 42,8                                                                | 38,29 | 142,8                                                 | 1.934.712.151 | 100                                                                 | 100 |
| Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun                                                                                                                            | dokumen |                                                              | 0 |                                                            | 0             | 3                                                                                    | 4.299.950     | 0                                                                                 | 2.200.000     | 0                                                                   | 42,2  | 0                                                     | 1.929.742.151 | 0                                                                   | 100 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen |                                                              | 0 |                                                            | 0             | 4                                                                                    | 103.990.000   | 2                                                                                 | 997.500       | 50                                                                  | 31,8  | 50                                                    | 1.268.250     | 2                                                                   | 100 |
| Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah                                       | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                | Persen  |                                                              | 0 | 100                                                        | 3.038.040.216 | 100                                                                                  | 3.707.403.214 | 57,1                                                                              | 910.616.218   | 57,1                                                                | 37,6  | 157,1                                                 | 4.838.915.663 | 100                                                                 | 100 |
|                                                                                       | Persentase laporan                                                                                                                                                     | Persen  | 3                                                            | 0 |                                                            | 0             |                                                                                      |               | 100                                                                               |               | 100                                                                 |       |                                                       |               |                                                                     |     |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                              | Satuan  | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |    | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                               | keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                               |         |                                                              |    |                                                            |             |                                                                                      |               |                                                                                   |             |                                                                     |      |                                                       |               |                                                                     |     |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | orang   |                                                              | 0  |                                                            | 0           | 19                                                                                   | 3.517.281.864 | 18                                                                                | 861.157.368 | 94,7                                                                | 38,5 | 18                                                    | 1.196.004.522 | 100                                                                 | 100 |
| Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                               | dokumen |                                                              | 0  |                                                            | 0           | 12                                                                                   | 181.944.000   | 3                                                                                 | 43.968.00   | 50                                                                  | 21,4 | 6                                                     | 38.946.000    | 100                                                                 | 100 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | dokumen |                                                              | 00 |                                                            | 0           | 1                                                                                    | 3.235.350     | 1                                                                                 | 3.235.350   | 100                                                                 | 99,9 | 1                                                     | 395.000       | 100                                                                 | 100 |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun                                            | laporan |                                                              |    |                                                            | 0           | 17                                                                                   | 4.942.000     | 8                                                                                 | 2.255.500   | 47,1                                                                | 42,1 | 8                                                     | 252.500       | 100                                                                 | 100 |
| Administrasi Kepegawaian perangkat daerah                                     | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian                                                                      | persen  |                                                              | 0  | 94,7                                                       | 12.000.000  | -                                                                                    | 0             | 0                                                                                 | 0           | 0                                                                   | 0    | 0                                                     | 0             | 0                                                                   | 100 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                        | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                                          | paket   |                                                              | 0  |                                                            | 0           | 19                                                                                   | 0             | 0                                                                                 | 0           | 0                                                                   | 0    | 0                                                     | 0             | 0                                                                   | 100 |
| Kegiatan administrasi umum perangkat                                          | persentase pelayanan yang difasilitasi                                                                             | Persen  |                                                              | 0  | 100                                                        | 307.479.457 | 100                                                                                  | 184.380.950   | 25                                                                                | 52.578.977  | 50                                                                  | 41   | 150                                                   | 2.109.933.584 | 100                                                                 | 100 |



| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan               | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |   | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>daerah</b>                                                    |                                                                                     |        |                                                              |   |                                                            |             |                                                                                      |             |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | Paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 8                                                                                    | 5.602.100   | 8                                                                                 | 1.402.100   | 100                                                                 | 100   | 1                                                     | 5.602.100   | 1                                                                   | 100 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 10                                                                                   | 17.380.900  | 10                                                                                | 6.880.900   | 100                                                                 | 60,5  | 1                                                     | 10.516.600  | 1                                                                   | 100 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan                                 | paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 1                                                                                    | 1.920.000   | 10                                                                                | 480.000     | 100                                                                 | 91,68 | 1                                                     | 2.840.000   | 1                                                                   | 100 |
| Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 2                                                                                    | 99.805.000  | 2                                                                                 | 18.470.000  | 100                                                                 | 28,38 | 4                                                     | 44.099.264  | 4                                                                   | 100 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | Paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 5                                                                                    | 10.871.700  | 5                                                                                 | 5.179.200   | 100                                                                 | 64,13 | 1                                                     | 4.505.000   | 1                                                                   | 100 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | Paket  |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 12                                                                                   | 5.556.000   | 3                                                                                 | 900.000     | 50                                                                  | 30,96 | 6                                                     | 1.720.000   | 6                                                                   | 100 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | paket  |                                                              |   |                                                            | 0           | 12                                                                                   | 43.245.250  | 3                                                                                 | 19.266.777  | 50                                                                  | 60,89 | 6                                                     | 31.469.954  | 6                                                                   | 100 |
| Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang               | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                        | persen |                                                              | 0 | 100                                                        | 902.515,587 | 100                                                                                  | 117.030.500 | 92,86                                                                             | 101.008.000 | 52,6                                                                | 30,58 | 52,6                                                  | 215.211.161 | 52,6                                                                | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                  | Satuan  | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |   | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| urusan pemerintah daerah                                                |                                                                                        |         |                                                              |   |                                                            |             |                                                                                      |             |                                                                                   |             |                                                                     |           |                                                       |             |                                                                     |     |
| Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | unit    |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 17                                                                                   | 117.030.500 | 13                                                                                | 101.008.000 | 52,6<br>3                                                           | 62,3<br>2 | 20                                                    | 150.670.000 | 20                                                                  | 100 |
| Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah                              | persen  |                                                              | 0 | 100                                                        | 531.019.635 | 100                                                                                  | 559.783.080 | 25                                                                                | 134.863.877 | 50                                                                  | 39,5<br>3 | 150                                                   | 223.677.040 | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 12                                                                                   | 127.800.000 | 3                                                                                 | 30.911.939  | 50                                                                  | 42,6      | 6                                                     | 50.522.549  | 6                                                                   | 100 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 12                                                                                   | 431.983.080 | 3                                                                                 | 103.951.938 | 50                                                                  | 42,6      | 6                                                     | 173.154.491 | 6                                                                   | 100 |
| Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                      | persen  |                                                              | 0 | 100                                                        | 553.033.672 | 100                                                                                  | 442.583.215 | 80                                                                                | 194.366.629 | 50                                                                  | 41,7<br>1 | 50                                                    | 150.440.000 | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan     | Unit    |                                                              | 0 |                                                            | 0           | 1                                                                                    | 41.610.000  | 1                                                                                 | 9.608.630   | 100                                                                 | 38,0<br>4 | 1                                                     | 15.450.000  | 1                                                                   | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                  | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |               | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                | dibayarkan Pajaknya                                                                                    |        |                                                              |               |                                                            |            |                                                                                      |               |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |       |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit   |                                                              | 0             |                                                            | 0          | 36                                                                                   | 251.574.971   | 17                                                                                | 49.585.999  | 51,35                                                               | 7,03  | 19                                                    | 13.120.000  | 19                                                                  | 100   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Sosial yang dipelihara                                 | Unit   |                                                              | 0             |                                                            | 0          | 1                                                                                    | 123.218.244   | 1                                                                                 | 122.894.000 | 100                                                                 | 99,64 | 2                                                     | 114.000.000 | 2                                                                   | 100   |
| Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara                                              | unit   |                                                              | 0             |                                                            | 0          | 38                                                                                   | 26.180.000    | 9                                                                                 | 12.280.000  | 68,75                                                               | 41,25 | 11                                                    | 7.870.000   | 11                                                                  | 100   |
| Program pemberdayaan sosial                                                                                      | Persentase SDM Kesos tersertifikasi                                                                    | persen | 37,4                                                         | 2.042.331.500 |                                                            | 0          | 7,6                                                                                  | 1.327.317.025 |                                                                                   | 769.453.750 | 100                                                                 | 15,1  | 29                                                    | 200.033.800 | 100                                                                 | 49,97 |
|                                                                                                                  | LKS terakreditasi                                                                                      | persen | 100                                                          | 16.931.600    |                                                            | 0          | 75                                                                                   | 10.457.125    | 33.3                                                                              | 9.008.750   | 100                                                                 | 41    |                                                       |             |                                                                     |       |
| Kegiatan pengumpulan sumbangan                                                                                   | Persentase pemerlu yang diberikan rekomendasi pengumpulan sumbangan                                    | persen |                                                              | 0             | 70                                                         | 13.397.250 | 15                                                                                   | 10.457.125    | 4                                                                                 | 9.008.750   | 42,86                                                               | 77,79 | 100                                                   | 10.422.250  | 100                                                                 | 100   |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                           | Satuan   | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |               | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| dalam daerah kabupaten/ kota                                                                         | atau undian gratis berhadiah                                                                                                    |          |                                                              |               |                                                            |               |                                                                                      |               |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | dokumen  |                                                              | 0             |                                                            |               | 15                                                                                   | 10.457.125    | 4                                                                                 | 9.008.750   | 30                                                                  | 77,79 | 3                                                     | 10.422.250  | 3                                                                   | 100 |
| Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah                                     | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mendapatkan peningkatan SDM                                                      | persen   | 91,2                                                         | 1.880.199.900 | 72.03                                                      | 1.672.472.750 |                                                                                      | 1.316.859.900 | 16,1                                                                              | 760.445.000 | 36,79                                                               | 14,38 | 73,5                                                  | 189.611.550 | 80,77                                                               | 100 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota                    | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | orang    |                                                              | 0             |                                                            | 0             | 310                                                                                  | 261.338.450   |                                                                                   | 1.439.000   | 12,7                                                                | 5,43  | 40                                                    | 14.766.000  | 43,96                                                               | 100 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten-Kota        | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | orang    |                                                              | 0             |                                                            | 0             | 21                                                                                   | 145.561.495   |                                                                                   | 22.007.500  | 100                                                                 | 37,98 | 21                                                    | 38.084.100  | 23,08                                                               | 100 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan                                                   | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | keluarga |                                                              | 0             |                                                            | 0             | 160                                                                                  | 36.192.600    |                                                                                   | 0           | 100                                                                 | 43,47 | 80                                                    | 17.600.000  | 87,91                                                               | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                                           | Satuan     | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |               | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten-Kota                                                                  |                                                                                                                                                 |            |                                                              |               |                                                            |               |                                                                                      |               |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |       |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | lembaga    |                                                              | 0             |                                                            | 0             | 87                                                                                   | 860.643.730   | 74                                                                                | 737.007.500 | 42,28                                                               | 11,88 | 42                                                    | 105.469.500 | 46,15                                                               | 100   |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | sertifikat |                                                              | 0             |                                                            | 0             | 35                                                                                   | 13.123.625    |                                                                                   | 0           | 100                                                                 | 75,2  | 25                                                    | 13.691.950  | 27,27                                                               | 100   |
| Program rehabilitasi sosial                                                                                | Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi | Persen     | 100                                                          | 2.362.276     | 100                                                        | 0             | 100                                                                                  | 1.664.762.350 | 48,8                                                                              | 126.270.000 | 48                                                                  | 37,12 | 54                                                    | 635.546.016 | 100                                                                 | 42,06 |
|                                                                                                            | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi                                       | persen     |                                                              | 0             |                                                            |               |                                                                                      |               |                                                                                   |             | 93,02                                                               | 4     |                                                       |             |                                                                     |       |
| Kegiatan rehabilitasi sosial dasar                                                                         | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia                                                                        | persen     | 100                                                          | 1.902.449.800 | 100                                                        | 1.462.215.155 | 100                                                                                  | 1.479.428.450 | 3,8                                                                               | 46.841.000  | 62,3                                                                | 36,5  | 162,3                                                 | 552.028.403 | 100                                                                 | 100   |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                     | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |   | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial                           |        |                                                              |   |                                                            |   |                                                                                      |               |                                                                                   |            |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Penyediaan Permakanan                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 1395                                                                                 | 1.135.925.000 | 0                                                                                 | 6.327.500  | 84,76                                                               | 30,78 | 606                                                   | 324.250.000 | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Sandang                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota         | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 120                                                                                  | 40.858.300    |                                                                                   | 0          | 100                                                                 | 99,79 | 120                                                   | 40.771.800  | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Alat Bantu                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 42                                                                                   | 58.250.000    |                                                                                   | 0          | 0                                                                   | 70,17 | 0                                                     | 73.680.000  | 0                                                                   | 100 |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 100                                                                                  | 76.339.000    | 23                                                                                | 25.379.500 | 12                                                                  | 45,79 | 24100                                                 | 62.901.155  | 24                                                                  | 100 |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan                                                   | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 130                                                                                  | 131.050.000   | 0                                                                                 | 12.600.000 | 39,22                                                               | 33,34 | 100                                                   | 43.452.500  | 100                                                                 | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                                                                             | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |                 | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Spiritual, dan Sosial                                                                                                                                         | Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                   |        |                                                              |                 |                                                            |             |                                                                                      |             |                                                                                   |            |                                                                     |           |                                                       |            |                                                                     |     |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota | orang  |                                                              | 0               |                                                            | 0           | 70                                                                                   | 27.503.650  | 0                                                                                 | 0          | 0                                                                   | 0         | 0                                                     | 0          | 0                                                                   | 100 |
| Pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                            | orang  |                                                              | 0               |                                                            | 0           | 50                                                                                   | 9.502.500   | 14                                                                                | 2.534.000  | 76,1<br>9                                                           | 40,1<br>1 | 32                                                    | 6.972.948  | 31                                                                  | 100 |
| Kegiatan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial                             | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang direhabilitasi                                                                                  | persen | 100                                                          | 361.688.80<br>0 | 111,4                                                      | 191.798.113 | 100                                                                                  | 185.333.900 | 48.8                                                                              | 79.429.000 | 48,9                                                                | 41,7<br>4 | 146,<br>9                                             | 83.517.613 | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun                                                                                            | orang  |                                                              | 0               |                                                            | 0           | 70                                                                                   | 27.349.000  | 70                                                                                | 27.349.000 | 100                                                                 | 99,1      | 60                                                    | 17.118.000 | 60                                                                  | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                          | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |               | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                                          | Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      |        |                                                              |               |                                                            |   |                                                                                      |                |                                                                                   |             |                                                                     |           |                                                       |             |                                                                     |      |
| Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | orang  |                                                              | 0             |                                                            | 0 | 270                                                                                  | 24.500.000     | 70                                                                                | 24.500.000  | 10                                                                  | 100       | 70                                                    | 24.500.000  | 70                                                                  | 100  |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota                        | orang  |                                                              | 0             |                                                            | 0 | 270                                                                                  | 115.071.150    | 50                                                                                | 19.178.000  | 26,2<br>3                                                           | 24,0<br>5 | 80                                                    | 29.587.250  | 80                                                                  | 100  |
| Pemberian pelayanan penelusuran keluarga                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                         | orang  |                                                              | 0             |                                                            | 0 | 50                                                                                   | 6.597.500      | 42                                                                                | 3.000.000   | 100                                                                 | 15,6<br>4 | 64                                                    | 1.975.000   | 64                                                                  | 100  |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota                        | orang  |                                                              |               |                                                            | 0 | 50                                                                                   | 11.816.250     | 17                                                                                | 5.402.000   | 42,5                                                                | 45,5<br>4 | 17                                                    | 10.337.363  | 17                                                                  | 100  |
| Program perlindungan dan jaminan sosial                  | Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan perlindungan sosial                            | Persen | 79,5                                                         | 5.528.326.700 |                                                            | 0 | 79,1                                                                                 | 16.005.886.188 | 86.2                                                                              | 798.142.999 | 100                                                                 | 5,89      | 174                                                   | 931.133.584 | 100                                                                 | 47,2 |
|                                                          | Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid                                                        | Persen |                                                              | 0             |                                                            | 0 |                                                                                      |                |                                                                                   |             | 100                                                                 | 82        |                                                       |             |                                                                     |      |
|                                                          | Persentase mayarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial                                         | persen |                                                              | 0             |                                                            | 0 |                                                                                      |                |                                                                                   |             | 96,2<br>3                                                           | 23        |                                                       |             |                                                                     |      |
| Kegiatan                                                 | Persentase                                                                                                     | Persen |                                                              | 0             |                                                            | 0 |                                                                                      |                |                                                                                   |             | 13,4                                                                | 5,89      | 108,                                                  | 931.133.584 | 100                                                                 | 100  |



| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                   | Satuan   | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |             | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota | desa/jkelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS                                                                  |          |                                                              |             |                                                            |   |                                                                                      |                |                                                                                   |             | 6                                                                   |       | 2                                                     |             |                                                                     |      |
|                                                              | Persentase keluarga miskin dan rentan dalam DTKS yang menerima bantuan sosial                                           | persen   |                                                              |             |                                                            | 0 |                                                                                      |                |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |      |
|                                                              | Persentase penerima bantuan pengembangan ekonomi masyarakat                                                             | persen   | 100                                                          | 0           |                                                            | 0 | 100                                                                                  | 0              |                                                                                   |             |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |      |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten-Kota         | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           | Orang    |                                                              | 0           |                                                            | 0 | 685875                                                                               | 240.009.250    | 670092                                                                            | 69.833.499  | 94,25                                                               | 65,25 | 687674                                                | 181.161.584 | 100                                                                 | 100  |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten-Kota  | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | Keluarga |                                                              | 0           |                                                            | 0 | 280341                                                                               | 12.274.500     |                                                                                   | 0           | 94,22                                                               | 13,28 | 623772                                                | 3.000.000   | 100                                                                 | 100  |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga |                                                              | 0           |                                                            | 0 | 17270                                                                                | 15.530.191.888 | 3635                                                                              | 727.784.500 | 20                                                                  | 4,34  | 3340                                                  | 650.972.000 | 100                                                                 | 100  |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat           | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota                             | orang    |                                                              | 0           |                                                            | 0 | 140                                                                                  | 223.410.550    |                                                                                   | 525.00      | 0                                                                   | 19,2  | 0                                                     | 96.000.000  | 0                                                                   | 100  |
| Program penanganan                                           | Persentase korban bencana yang tertangani                                                                               | Persen   | 100                                                          | 519.454.100 |                                                            | 0 | 100                                                                                  | 458.422.600    | 100                                                                               | 229.205.000 | 100                                                                 | 43,02 | 200                                                   | 268.573.000 | 100                                                                 | 44,4 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                                                           | Satuan | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |   | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| bencana                                                                     | Persentase desa siaga bencana yang aktif                                                                                                                        | persen | 16,3                                                         |   |                                                            |   | 16,3                                                                                 |             | 0                                                                                 |             | 0                                                                   | 0         | 0                                                     |             |                                                                     |     |
| Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota | persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial                                                                                                  | persen |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 100                                                                                  | 367.704.700 | 100                                                                               | 191.100.00  | 100                                                                 | 50,5<br>2 | 200                                                   |             |                                                                     |     |
| Penyediaan Makanan                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 7900                                                                                 | 295.979.700 | 3626                                                                              | 146.270.000 | 46,1<br>9                                                           | 50,6<br>4 | 3626                                                  | 210.169.000 | 100                                                                 | 100 |
| Penyediaan Sandang                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 100                                                                                  | 36.000.000  | 18                                                                                | 9.350.000   | 9                                                                   | 99,1<br>7 | 18                                                    | 35.700.000  | 18                                                                  | 100 |
| Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                     | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | unit   |                                                              |   |                                                            | 0 | 1                                                                                    | 9.350.000   | 1                                                                                 | 0           | 100                                                                 | 0         | 1                                                     |             | 1                                                                   | 100 |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | orang  |                                                              |   |                                                            | 0 | 200                                                                                  | 16.540.000  | 25                                                                                | 0           | 12,5                                                                | 0         | 25                                                    | 0           | 25                                                                  | 100 |
| Pelayanan Dukungan                                                          | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan                                                                                                                          | orang  |                                                              | 0 |                                                            | 0 | 200                                                                                  | 9.835.000   | 21                                                                                | 0           | 21                                                                  | 0         | 21                                                    | 0           | 21                                                                  | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                    | Satuan  | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |                             | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Psikososial                                                                                     | Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |         |                                                              |                             |                                                            |             |                                                                                      |             |                                                                                   |            |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota | Persentase desa siaga bencana yang aktif                                                                                 | Persen  |                                                              | 72.021.200                  | 14,7                                                       | 123.939.130 | 16,3                                                                                 | 90.717.900  | 0                                                                                 | 38.105.000 |                                                                     |       |                                                       | 22.704.000  |                                                                     |     |
|                                                                                                 | Persentase Taruna Siaga Bencana (tagana) yang aktif                                                                      | persen  |                                                              |                             |                                                            |             |                                                                                      |             | 0                                                                                 |            |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                   | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung |                                                              |                             |                                                            | 0           | 40                                                                                   | 28.217.900  | 0                                                                                 | 1.440.000  | 0                                                                   | 0     | 0                                                     | 0           |                                                                     |     |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                    | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    | orang   |                                                              | 0                           |                                                            | 0           | 36                                                                                   | 62.500.000  | 40                                                                                | 36.665,000 | 100                                                                 | 21,66 | 40                                                    | 22.704.000  | 100                                                                 | 100 |
| Program pengelolaan taman makam pahlawan                                                        | Persentase sarpras taman makam pahlawan (TMP) yang sesuai standar                                                        | persen  | 95                                                           | 270.472<br>.<br>5<br>0<br>0 |                                                            | 0           | 90                                                                                   | 104.308.160 | 95                                                                                | 1.249.300  | 100                                                                 | 88,59 | 180                                                   | 101.789.500 | 100                                                                 | 100 |

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan                                                  | Satuan  | Target Renstra pada Tahun 2024-2026 (Periode Renstra) (2026) |             | Realisasi capaian kinerja PD s/d renja PD tahun lalu (n-2) |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2025) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd triwulan I (2025) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d 2025 (%) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                 |                                                                                                                        |         |                                                              |             |                                                            |             |                                                                                      |             |                                                                                   |           |                                                                     |       |                                                       |             |                                                                     |     |
| Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota             | Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional dalam kondisi baik                                           | persen  |                                                              |             |                                                            | 0           | 90                                                                                   | 104.308.160 | 95                                                                                | 221.300   | 100                                                                 | 88,59 | 180                                                   |             |                                                                     |     |
| Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten/ kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | dokumen | 95                                                           | 270.472.500 | 95                                                         | 215.378.000 | 1                                                                                    | 89.449.160  | 1                                                                                 |           | 100                                                                 | 99,62 | 1                                                     | 100.000.000 |                                                                     |     |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten-Kota                       | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                   | makam   |                                                              | 0           |                                                            | 0           | 1                                                                                    | 14.859.000  | 1                                                                                 | 1.249.300 | 100                                                                 | 12,32 | 1                                                     | 1.789.500   | 1,05                                                                | 100 |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja sampai dengan tribulan I tahun 2025 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupten Jombang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025**  
**Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

| Sasaran Strategis                                                                                                                      | Indikator Sasaran                                                                                                                                                   | 2025        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Target      | Realisasi |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat miskin dan rentan                                                                              | Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                           | 52,00%      | 58,21%    |
| Meningkatnya kemandirian sosial Masyarakat miskin dan rentan                                                                           | Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya                                                                                        | 10,47%      | 0%        |
| Terlaksananya perananan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                              | Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                                                              | 100%        | 56,69%    |
| Tercapainya SPM bidang sosial                                                                                                          | Persentase capaian SPM bidang sosial                                                                                                                                | 100%        | 25,33%    |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah                                                                                 | Nilai evaluasi AKIP OPD                                                                                                                                             | 81,95 nilai | 0%        |
| Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelestarian, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanaan sosial, dan restorasi sosial | Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanaan sosial serta restorasi sosial | 85%         | 40%       |

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Sosial Tribulan I Tahun 2025, terdapat beberapa dinamika dalam pencapaian sasaran strategis yang perlu dicermati. Sasaran *terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan* menunjukkan capaian yang **melampaui target**, yaitu sebesar 58,21% dari target 52,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa

intervensi bantuan sosial dan layanan dasar berjalan cukup efektif dalam menjangkau kelompok sasaran. Namun, pada sasaran *meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan*, capaian justru **tidak tercapai sama sekali** (0% dari target 10,47%), dikarenakan penghitungan realisasi pada akhir tahun.

Selanjutnya, pada sasaran *terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*, partisipasi Pekerja Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baru mencapai 56,69% dari target 100%, menandakan masih lemahnya sinergi dan pelibatan aktif aktor sosial masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program kesejahteraan. Demikian pula, capaian *Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial* baru berada pada angka 25,33%, jauh dari target 100%, yang mencerminkan perlunya percepatan dan penguatan tata kelola pelayanan sosial yang sesuai dengan standar nasional.

Di sisi tata kelola, *nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)* belum menunjukkan capaian sama sekali (0 dari target nilai 81,95), yang menandakan adanya tantangan dalam penguatan sistem manajemen kinerja berbasis akuntabilitas dan pelaporan. Terakhir, pada sasaran *meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepehlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial*, capaian baru mencapai 40% dari target 85%, menunjukkan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai sosial masih memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan partisipatif.

Secara umum, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa meskipun ada keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, namun berbagai aspek lain seperti pemberdayaan, partisipasi sosial, dan tata kelola perlu ditingkatkan secara signifikan melalui strategi yang lebih terintegrasi dan kolaboratif ke depan.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian SPM bidang Sosial Sampai Dengan Tribulan I Tahun 2025**  
**Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

| No |   | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 1  |   | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348        | 37           | 10,63       |
|    | 1 | <b>Layanan data dan pengaduan</b><br>Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial                                                                                                             | 15         | 3            | 20          |
|    | 2 | <b>Penyediaan permakanan</b><br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105        | 0            | 0           |
|    | 3 | <b>Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b><br>(layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)                                                                                                                                                                                    | 12         | 3            | 25          |
|    | 4 | <b>Penyediaan sandang</b><br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30         | 0            | 0           |
|    | 5 | <b>Penyediaan alat bantu</b><br>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                                                                                                                                                                      | 15         | 0            | 0           |
|    | 6 | <b>Penyediaan perbekalan Kesehatan</b><br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         | 25           | 100         |
|    | 7 | <b>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</b><br>Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | 50         | 0            | 0           |

| No       | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 8        | <b>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar</b><br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat) | 70         | 0            | 0           |
| 9        | Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | 0            | 0           |
| 10       | <b>Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar</b><br>(fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | 0            | 0           |
| 11       | <b>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga</b><br>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                  | 8          | 2            | 25          |
| 12       | <b>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b><br>(pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)                                                                                                                                                                     | 8          | 1            | 12,5        |
| 13       | <b>Layanan rujukan</b><br>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                         | 12         | 3            | 25          |
| <b>2</b> | <b>Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336        | 48           | 14,29       |
| 1        | <b>Layanan data dan pengaduan</b><br>Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial                  | 48         | 0            | 0           |
| 2        | <b>Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b><br>(layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)                                                                                         | 45         | 2            | 43          |
| 3        | <b>Penyediaan permukiman</b><br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                                                                            | 125        | 0            | 0           |
| 4        | <b>Penyediaan sandang</b><br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | 0            | 0           |



| No       | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|          | dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |
| 5        | <b>Penyediaan perbekalan Kesehatan</b><br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         | 20           | 100         |
| 6        | <b>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</b><br>Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | 42         | 42           | 0           |
| 7        | <b>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar</b><br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                                              | 0          | 0            | 0           |
| 8        | Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6          | 0            | 0           |
| 9        | <b>Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar</b><br>(fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8          | 0            | 0           |
| 10       | <b>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga</b><br>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62         | 0            | 0           |
| 11       | <b>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b><br>(pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)                                                                                                                                                                                                                                                                | 26         | 4            | 15,38       |
| 12       | <b>Layanan rujukan</b><br>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7          | 2            | 28,57       |
| <b>3</b> | <b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>432</b> | <b>27</b>    | <b>6,25</b> |
| 1        | <b>Layanan data dan pengaduan</b><br>Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial                                                                                                             | 31         | 7            | 33,33       |

| No | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 2  | <b>Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b><br>(layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)                                                                                                                                                                                   | 14         | 7            | 50          |
| 3  | <b>Penyediaan permakanan</b><br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210        | 0            | 0           |
| 4  | <b>Penyediaan sandang</b><br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45         | 0            | 0           |
| 5  | <b>Penyediaan alat bantu</b><br>(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | 0            | 0           |
| 6  | <b>Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar</b><br>(fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         | 20           | 100         |
| 7  | <b>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</b><br>Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | 50         | 0            | 0           |
| 8  | <b>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar</b><br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                                      | 0          | 0            | 0           |
| 9  | Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | 0            | 0           |
| 10 | <b>Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar</b><br>(fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 2            | 66,67       |
| 11 | <b>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga</b><br>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 6            | 31,58       |
| 12 | <b>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b><br>(pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16         | 4            | 25          |

| No |    | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|    |    | memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             |
|    | 13 | <b>Layanan rujukan</b><br>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         | 1            | 5,26        |
| 4  |    | <b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177        | 44           | 24,86       |
|    | 1  | <b>Layanan data dan pengaduan</b><br>Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial                                                                                                            | 30         | 14           | 44,67       |
|    | 2  | <b>Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b><br>(layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)                                                                                                                                                                                   | 32         | 14           | 43,75       |
|    | 3  | <b>Penyediaan permakanan</b><br>(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         | 0            | 0           |
|    | 4  | <b>Penyediaan sandang</b><br>(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15         | 0            | 0           |
|    | 5  | <b>Penyediaan persediaan Kesehatan</b><br>(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5          | 0            | 0           |
|    | 6  | <b>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</b><br>Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis) | 0          | 0            | 0           |
|    | 7  | <b>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar</b><br>(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)                                                                                                      | 0          | 0            | 0           |

| No       |    | INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET SPM | REALIASI SPM | CAPAIAN (%) |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|          | 8  | Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | 0            | 0           |
|          | 9  | <b>Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar</b><br>(fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)                                                                                                                                                                                                                    | 6          | 1            | 16,67       |
|          | 10 | <b>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga</b><br>(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)                                                                                                                                                                                                           | 13         | 2            | 15,38       |
|          | 11 | <b>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b><br>(pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)                                                                                                                              | 48         | 13           | 27          |
|          | 12 | <b>Layanan rujukan</b><br>(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 0            | 0           |
| <b>5</b> |    | <b>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 7900       | 5566         | 70,46       |
|          | 1  | Penyediaan permakanan<br>(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                                         | 7900       | 5566         | 70,46       |
|          | 2  | Penyediaan sandang<br>(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus Perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan Perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam anak Perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kodware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)                                             | 100        | 100          | 100         |
|          | 3  | Penyediaan tempat penampungan pengungsi<br>(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistic, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)                                                                                                                            | 1          | 1            | 100         |
|          | 4  | Penanganan khusus bagi kelompok rentan<br>(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb)                                                                                                                                                                 | 200        | 0            | 0           |
|          | 5  | Pelayanan dukungan psikososial<br>(Upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/stuasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ trauma healing dsb) | 200        | 0            | 0           |

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang.**

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial

Dalam mensinkronkan antara visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengembangkam amanah untuk mewujudkan misi kesatu, yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi 33 Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 | Bab-II pekerti luhur, religius dan berdaya saing global. Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta penguatan kapasitas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dinas Sosial turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dengan memberikan intervensi sosial yang terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja perubahan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Indentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bias terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal. Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa Internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan publik di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sebagai OPD baru Dinas Sosial dituntut untuk segera menyesuaikan dengan kondisi OPD-OPD yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ini sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena penyelenggaraan kesejahteraan sosial memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dibidang sosial diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tertib, efisien dan efektif.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan sebagai penyelenggaran kesejahteraan sosial mempunyai permasalahan dan hambatan yaitu :

b. Permasalahan

- Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
- Belum maksimalnya pemutakhiran DTKS
- Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial
- Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

c. Hambatan

- Cakupan atau jangkaun pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial masih terbatas.
- Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS masih perlu peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat
- Belum adanya kawasan/ tempat rehabilitasi sosial
- Peran masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
- Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtansi teknis dan praktis masih terbatas, koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal
- Peran pemerintah masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan itu sendiri

2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial

Berikut adalah matrik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap pelayanan Dinas Sosial:

| <b>STRENGTHS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>WEAKNESS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya regulasi nasional sebagai dasar pelayanan (SPM, DTKS, SIKS-NG)</li> <li>- Dukungan kebijakan daerah melalui RPJMD an Renstra PD</li> <li>- Ketersediaan SDM relawan sosial seperti TKSK, PSM, tagana</li> <li>- Capaian SPM sosial mendekati 100% secara konsisten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran dibandingkan luasnya sasaran layanan</li> <li>- Keterbatasan SDM ASN dan fasilitas pendukung layanan lapangan</li> <li>- Kualitas dan pembaruan PPKS/ DTKS belum sepenuhnya optimal</li> <li>- Evauluasi mutu layanan belum merata di seluruh unit kerja</li> </ul>           |
| <b>OPPORTUNITIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>THREATS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan teknologi informasi dan sistem digitalisasi layanan (SIKS-NG, e-SAKIP, e-SPM)</li> <li>- Kemitraan dengan LKS, dunia usaha (CSR)</li> <li>- Peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluktuasi kondisi sosial akibat krisis ekonomi atau bencana alam</li> <li>- Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial jangka Panjang</li> <li>- Tantangan geografis dalam mejangkau wilayah terpencil</li> <li>- Belum stabilnya sinergi antar OPD dan antar-level pemerintahan</li> </ul> |

Dengan berbagai ancaman/tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial tersebut, maka mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antar sektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.



a). Rancangan isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2025, yaitu :

- 1) Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas & nilai tambah sumber daya local
- 2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
- 3) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan, sanitasi & sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan
- 4) Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local
- 5) Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana
- 7) Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

a. Isu strategis Kabupaten Jombang

Berdasarkan penelaahan terhadap isu internasional, nasional, kebijakan provinsi serta permasalahan Pembangunan Kabupaten Jombang, maka ditetapkan isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan SDGs dan SDGs Desa
- 2) Tata Kelola pemerintah dan pelayanan public
- 3) Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter
- 4) Mewujudkan harmoni sosial
- 5) Penguatan daya saing
- 6) Pemantapan ekonomi dan ketahanan ekonomi
- 7) Pelestarian lingkungan (pencemaran)
- 8) Pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif
- 9) Pengentasan kemiskinan melalui penanganan kemiskinan ekstrim

b. Isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Jombang menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana Pembangunan memperhatikan keberlanjutan hidup dan kualitas hidup Masyarakat. KLHS mendorong prinsip inklusi sosial,

ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana, yang selaras dengan mandat Dinas Sosial.

Isu-isu strategis KLHS yang relevan dengan urusan sosial antara lain:

- a. Kerentanan sosial akibat degradasi lingkungan dan bencana alam, yang berdampak pada kelompok miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak. Hal ini menuntut penguatan system perlindungan sosial berbasis risiko
- b. Kesenjangan akses terhadap pelayanan sosial di wilayah rentan ekologis, seperti daerah rawan banjir atau kekeringan, yang memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi
- c. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan sosial Masyarakat Dimana Dinas Sosial perlu merespon dengan program adaptasi berbasis komunitas dan dukungan psikososial pasca bencana

Matrik Isu strategis Dinas Sosial

| Potensi daerah yang permasalahan menjadi kewenangan PD                                                             | Isu KLHS yang relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Isu Strategis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Masih tingginya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang belum mendapatkan layanan secara optimal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerentanan sosial akibat degradasi lingkungan dan bencana alam, yang berdampak pada kelompok miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak. Hal ini menuntut penguatan system perlindungan sosial berbasis risiko</li> <li>2. Kesenjangan akses terhadap pelayanan sosial di wilayah rentan ekologis, seperti daerah rawan banjir atau kekeringan, yang memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi</li> <li>3. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan sosial Masyarakat Dimana Dinas Sosial perlu merespon dengan program adaptasi berbasis komunitas dan dukungan psikososial pasca bencana</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isu sustainable development goals</li> <li>2. Perubahan iklim dunia dan kebutuhan mengatasin ya</li> <li>3. Isu globalisasi ekonomi</li> <li>4. Disrupsi teknologi dan komunikasi (TIK)</li> <li>5. Isu geopolitik dan geoekonomi</li> <li>6. Demografi global dengan porsu penduduk lanjut usia meningkat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Tengah persaingan global yang semakin meningkat</li> <li>2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia</li> <li>3. Pergeseran struktur kelas masyarakat Dimana jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah</li> <li>4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif</li> <li>5. Krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan mengancam masa depan bumi dan manusia</li> <li>6. Perkembangan risiko geopolitik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah</li> <li>2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup,</li> <li>3. Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pedndidikan, Kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas</li> <li>4. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik</li> <li>5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang religious, unggul dan berdaya saing yang bertumpu pada keluarga berkualitas</li> <li>2. Penguatan pondasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan perluasan investasi yang berdampak pada penurunan pengangguran , kemiskinan dan kesenjangan yang bertumpu pada optimalisasi sektor utama (perdagangan dan industry) didukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya jangkauan dan efektivitas layanan sosial terhadap PPKS dan penduduk miskin</li> <li>2. Belum terbangunnya sistem intervensi sosial yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor</li> <li>3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial</li> <li>4. Kualitas data PPKS dan sistem informasi kesejahteraan sosial belum mendukung pengambilan kebijakan yang tepat</li> </ol> |

| Potensi daerah yang permasalahan | Isu KLHS yang relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Isu Strategis PD |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                  |                                 |                                               | <p>dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global, salah satunya adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas.</p> <p>7. Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang diwarnai praktik korupsi membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan.</p> | <p>Pembangunan berkelanjutan</p> <p>6. Kedaulatan pangan dan peninglatan kesejahteraan petani</p> | <p>3. Optimalisasi sektor pertanian melalui implementasi agro-minapolitan, hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) bagi petani dan mendukung ketahanan pangan daerah</p> <p>4. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar inklusf pendoorng konektivitas pengembangan wilayah dan penyediaan utilitas sarana dan prasarana perkotaan yang cerdas (smart city) bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali</p> <p>5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup penerapan kebijakan ekonomi hijau, konservatif keanekaragaman hayati sesuai kewenangan daerah dan penguatan resiliensi masyarakat terhadap bencana</p> <p>6. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui intervensi yang tepat terhadap PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang difokuskan pada penduduk misin melalui pendekatan terintegrasi dengan melibatkan multi stakeholder</p> <p>7. Mewujudkan</p> |                  |

| Potensi daerah yang permasalahan | Isu KLHS yang relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Isu Strategis PD |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                  |                                 |                                               |  |  | kerukunan dan kesetaraan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai budaya serta agama guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum<br>8. Penguatan tata Kelola pemerintahan yang daptif, kapasitas aparatur yang lincah (agile) dan inovasi pelayanan public yang berbasis information communication and technology (ICT) |                  |

Tema dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025. Arah kebijakan Kabupaten Jombang tahun 2025 yakni **“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”**

Adapun prioritas pembangunan kabupaten Jombang tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat, keamanan dan ketentraman umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi daya saing dan produk unggulan daerah
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dengan adanya tema dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, maka Dinas Sosial sebagai pelaksana pemerintahan bidang sosial mempunyai tugas untuk mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2025, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya manusia

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas atau telah tersertifikasi, hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendidikan pelatihan dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh para stakeholder Dinas Sosial yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Dengan semakin handalnya sumber daya manusia maka diharapkan pembinaan dan pendidikan ketrampilan yang diberikan kepada PMKS akan semakin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMKS, sehingga diharapkan nanti PMKS akan semakin mandiri dan keluar dari kemiskinan dengan graduasi mandiri.

b. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS, seperti :

1. Sarana dan prasarana pelayanan sosial
2. Pusat usaha kesejahteraan sosial (puskessos)
3. Kelompok usaha bersama (KUBE)
4. Pusat rehabilitasi sosial
5. Pusat pendidikan dan pelatihan
6. Balai/panti sosial
7. Rumah singgah

c. Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat

serta dunia usaha. Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Koordinasi dan Sinergitas dengan OPD terkait

Mitra Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial mencakup berbagai pihak, baik unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

| Jenis Layanan                                     | Mitra Utama                                                                                                                                                         | Peran Kemitraan                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rehabilitasi sosial                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LKS</li> <li>- TKSK, PSM, Karang Taruna</li> <li>- Balai Rehabilitasi Kemensos</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan langsung</li> <li>- Rujukan kasus,</li> <li>- Pemulihan sosial</li> </ul>               |
| Perlindungan sosial saat bencana                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPBD</li> <li>- Tagana</li> <li>- Dinkes, RSUD</li> <li>- TNI/Polri</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggap darurat</li> <li>- Dapur umum</li> <li>- Layanan evakuasi pengungsi</li> </ul>            |
| Bantuan sosial tunai/ non tunai                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPKAD</li> <li>- Bank penyalur, kantor pos</li> <li>- Desa/kelurahan</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran bansos</li> <li>- Validasi data penerima</li> <li>- Pendampingan masyarakat</li> </ul> |
| Pemberdayaan ekonomi dan kemandirian PPKS         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dunia usaha (CSR)</li> <li>- Lembaga pelatihan kerja</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan ketrampilan</li> <li>- Pemberian modal usaha</li> <li>-</li> </ul>                      |
| Verifikasi dan validasi DTKS                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah desa</li> <li>- Dispendukcapil</li> <li>- TKSK</li> <li>- Kecamatan</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan ulang</li> <li>- Input sistem</li> <li>- Penyesuaian data kependudukan</li> </ul>       |
| Pelestarian nilai sosial dan kepahlawanan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi keagamaan/ sosial</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> <li>- LVRI</li> <li>- Bangkesbangpol</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Kegiatan edukasi</li> </ul>                                                |
| Penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas P3AKB</li> <li>- Polres</li> <li>- Lembaga perlindungan anak/ Perempuan</li> <li>- Rumah pelayanan sosial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konseling</li> <li>- Layanan rujukan</li> <li>- Penanganan hukum</li> </ul>                       |
| Monitoring dan evaluasi pelayanan sosial          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat, bappeda, bagian organisasi setda</li> <li>- Ombudsman</li> <li>- Menpan RB (PEKPPP)</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian kinerja</li> <li>- Standar pelayanan</li> <li>- Evaluasi akuntabilitas</li> </ul>       |

## 2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan berdasarkan kewenangan. Adapun tahun 2025 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025**

| No | Program/Kegiatan                                                                                | Lokasi                                     | Indikator Kinerja                                                                         | Besaran/<br>Volume | Catatan                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan kabupaten/kota | Jl. Ki Hajar Dewantara Gg.II No. 8 Jombang | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota | 90.000.000         | Peningkatan SDM karang taruna Kabupaten |

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD**

### **3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi**

#### **A. Kebijakan Nasional**

Kementerian PPN/Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “ Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sasaran utama RPJPN 2025-2045, yaitu :

- Sasaran visi 1 : Pendapatan per kapita setara negara maju
- Sasaran visi 2 : Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- Sasaran visi 3 : Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- Sasaran visi 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Sasaran visi 5 : Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

#### **Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045**

##### **1. Mewujudkan transformasi sosial**

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif

##### **2. Mewujudkan transformasi ekonomi**

Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN. Penerapan ekonomi hijau, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan

##### **3. Mewujudkan transformasi tata kelola**

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang dapat menghasilkan



regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia

Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan informasi

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif

Secara filosofis tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin.

Rancangan tema RKP 2025 “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

B. Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Rancangan tema RKPD 2025 Jawa Timur “ **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan**”

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2025

| <b>Tujuan</b>                                                                                       | <b>Sasaran</b>                                                                 | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan | Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin               | Memutakhirkan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melakukan pemutakhiran/update data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kota surabaya dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar                                                               | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Sosial | Menyusun perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>- Peningkatan perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar                                                               | Meningkatkan keterlibatan lembaga dalam kegiatan kemasyarakatan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggali dan mendayagunakan segenap potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat</li> <li>- Membina dan mengembangkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah</li> <li>- Memantapkan kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik di pemerintah maupun masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kegiatan keagamaan yang mendorong kerukunan beragama</li> <li>- Meningkatkan kegiatan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan mutu dan kemampuan sumber daya manusia (SDM)</li> <li>- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> <li>- Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> <li>- Peningkatan kegiatan yang mendorong toleransi beragama</li> <li>- Meningkatkan kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan</li> </ul> |
| Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar                                                               | Menurunnya jumlah PMKS                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendoorng dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial</li> <li>- Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial melalui peningkatan kemampuan unit pelaksana teknis</li> <li>- Menjadikan semua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial</li> <li>- Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS</li> <li>- Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS</li> </ul>                                                                                             |

| Tujuan | Sasaran | Strategi                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |         | program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat<br>- Mendorong dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat |                |

### C. Kebijakan Kabupaten Jombang

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Jombang. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2025-2029 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

| TUJUAN                                                                                                              | SASARAN                                                                          | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua</b>                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitasm berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tujuan 1:</b><br>Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata     | - Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing | - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, baik primer maupun rujukan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, serta pemasyarakatan olahraga yang diprioritaskan di wilayah kecamatan tertinggal.<br>- Optimalisasi pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB), serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan di wilayah kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. | - Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan).<br>- Peningkatan peran puskesmas dan puskesmas pembantu dalam perluasan jangkauan edukasi dan implementasi KB dan perlindungan perempuan dan anak. |
|                                                                                                                     |                                                                                  | - Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat melalui fasilitasi peningkatan budaya membaca dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan pendidikan secara                                                                                                                                                                                                                           |

| TUJUAN                                                                                      | SASARAN                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua</b>                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             |                                            | pengelolaan pendidikan formal dan non formal tingkat prasekolah hingga sekolah menengah (sesuai kewenangan kabupaten), baik pada operasional sekolah, siswa, kurikulum, maupun tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh wilayah kecamatan | bertahap di seluruh wilayah kecamatan.                                                                                                                                |
|                                                                                             |                                            | - Meningkatkan partisipasi / peran / pemberdayaan pemuda dalam pembangunan (ekonomi maupun sosial) di seluruh wilayah kecamatan.                                                                                                             | - Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan serta peran strategis dalam pembangunan.                                                                           |
|                                                                                             | - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat    | - Mengoptimalkan penyelenggaraan layanan penyediaan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi PPKS di wilayah kecamatan dengan kategori terbelakang                                                           | - Integrasi program lintas sektoral untuk mempercepat perluasan akses layanan kesehatan secara bertahap difokuskan di wilayah kecamatan tertinggal (titik kemiskinan) |
|                                                                                             |                                            | - Mengoptimalkan perlindungan pada masyarakat melalui upaya mitigasi dan penanganan dampak berbagai bentuk bencana daerah di kecamatan rawan bencana.                                                                                        | - Peningkatan penanganan bencana berbasis masyarakat melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana.                                                                 |
|                                                                                             |                                            | - Manajemen data penduduk dan kemiskinan yang akurat / valid berbasis desa.                                                                                                                                                                  | - Percepatan satu data indonesia di wilayah kabupaten secara bertahap.                                                                                                |
| <b>Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| <b>Tujuan 2:</b><br>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas                        | - Meningkatnya PDRB sektor unggulan daerah | - Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan Jombang, pengembangan pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah, pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, dan jasa di seluruh wilayah kecamatan    | - Hilirisasi komoditas unggulan daerah agar berdampak pada peningkatan nilai tambah petani.<br>- Menciptakan daya dukung bagi pengembangan industri dan perdagangan   |
|                                                                                             |                                            | - Penguatan unsur pendukung ketahanan (ketersediaan, distribusi dan keamanan) pangan daerah/masyarakat di wilayah kecamatan penghasil produk pertanian                                                                                       | - Pemetaan dan perlindungan produk pangan lokal potensial dan diversifikasi pangan secara bertahap                                                                    |
|                                                                                             | - Meningkatnya                             | - Menciptakan situasi                                                                                                                                                                                                                        | - Kebijakan selektif                                                                                                                                                  |

| TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN                                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | investasi daerah                                                                | kondusif untuk investasi daerah (meningkatkan daya saing berinvestasi) melalui kemudahan perizinan / berinvestasi, kebijakan yang mendukung, dan promosi investasi di wilayah kecamatan strategis daerah                                                                                                                                              | terhadap jenis investasi yang diprioritaskan pada investasi padat karya atau yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | - Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan perdesaan | - Memperluas kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan) di berbagai sektor, khususnya di usaha perdagangan-jasa, industri dan ekonomi kreatif, dan lain-lain yang memberikan nilai tambah tinggi di kecamatan yang memiliki aktivitas industri. | - Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan (user) untuk memastikan kualifikasi angkatan kerja telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | - Membangun perdesaan melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan desa, serta peningkatan pelayanan dasar di desa dan kerjasama desa di seluruh kecamatan                                                                                                                                          | - Stimulus peningkatan kapasitas pemerintah desa yang dilakukan simultan dengan pengembangan ekonomi lokal dan layanan dasar                                                             |
| <b>Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tujuan 3:</b><br>Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan                                                                                                                                                                     | - Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman                        | - Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman dan rumah layak huni, mencakup sanitasi, air minum, jaringan drainase, maupun sarana prasarana dan utilitas umum di kecamatan wilayah perkotaan.                                                                                                                                    | - Difokuskan pada pemenuhan SPM perumahan permukiman sebagai komitmen pemerintah daerah yang dilakukan simultan dengan peningkatan layanan utilitas sarana prasarana perkotaan yang maju |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | - Meningkatkan fasilitasi rumah bagi korban bencana serta resiliensi masyarakat terhadap bencana di kecamatan yang tertimpa bencana                                                                                                                                                                                                                   | - Sinergi program vertikal dan horizontal untuk percepatan penanganan bencana secara cepat dan tepat.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | - Meningkatnya pembangunan infrastruktur                                        | - Percepatan penyediaan maupun pemeliharaan jalan, jembatan dan infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Percepatan akses konektivitas dan mobilitas antar wilayah                                                                                                                              |

| TUJUAN                                                                                                                                                                              | SASARAN                                                                                                             | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua</b>                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                     | pekerjaan umum                                                                                                      | <p>sumberdaya air di kecamatan dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan terobosan untuk penyelenggaraan tata ruang secara konsisten dan sesuai ketentuan di seluruh kecamatan</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <p>strategis yang difokuskan untuk pengembagn ekonomi dan pengembangan potensi lokal yang diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang</p>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pelayanan infrastruktur perhubungan</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pemenuhan kelengkapan jalan pendukung kriteria jalan berkeselamatan di wilayah kecamatan dengan kualitas jalan di bawah standar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggulangan jalan dengan tingkat resiko sesuai dengan pemetaan jenis jalan berdasarkan resiko keselamatan secara bertahap.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan upaya mitigasi/pencegahan serta penyelesaian kerusakan lingkungan hidup dari pencemaran air, udara, dan tanah - termasuk di dalamnya pengelolaan persampahan di kecamatan perkotaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian sumber pencemaran lingkungan dan persampahan di kawasan berbasis risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi aktivitas yang dapat mendukung perlindungan keanekaragaman hayati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal</b>                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan 4:</b><br>Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal                                                                                                 | Terwujudnya kenyamanan dan kesalehan sosial dalam masyarakat                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kolaborasi / kerjasama pemerintah daerah dengan unsur kelembagaan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan Jombang yang aman, kondusif, dan demokratis melalui optimalisasi layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan, peningkatan kerukunan hidup beragama dan kehidupan demokratis, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal di seluruh kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan jangkauan sosialisasi mengenai nilai-nilai kerukunan antara kelompok masyarakat secara konsisten dan melibatkan unsur pemuda.</li> <li>- penguatan sosialisasi perda / perkara kepada seluruh masyarakat untuk menekan pelanggaran dan penciptaan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.</li> </ul> |
| <b>Misi 5: menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (open &amp; collaborative governance), melayani, akuntabel, bersih dan bebas korupsi</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan 5:</b><br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi) dalam penyelenggaraan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal sebagai upaya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

| TUJUAN                                                         | SASARAN                                                                                                                                                           | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visi: Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| yang efektif dan efisien                                       |                                                                                                                                                                   | pemerintahan maupun pelayanan publik (optimalisasi penciptaan sistem pemerintahan berbasis elektronik) di seluruh Perangkat Daerah.                                                                                                                                                         | menciptakan budaya kerja dan kualitas kerja yang lebih efektivitas dan efisien.                                                                                                                                                            |
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan ASN yang profesional</li> <li>-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, baik pada kualitas sumber daya manusia, kebijakan tata kelola, sarana-prasarana pelayanan, dan sumberdaya pendukung yang relevan lainnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transformasi tata kelola pemerintahan yang lincah (agile) dan pelayanan publik menuju daya saing daerah yang kompetitif</li> </ul>                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi untuk menekan kebocoran dan pengabaian kewajiban membayar pajak dan retribusi oleh wajib pajak.</li> </ul>                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset dan optimalisasi pemanfaatannya untuk penciptaan inovasi di seluruh perangkat daerah</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan riset dan inovasi yang difokuskan untuk dasar kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah</li> </ul>                                                                      |
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pengelolaan (perencanaan implementasi-monev peningkatan) kebijakan publik di berbagai bidang sesuai kebutuhan terkini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di seluruh perangkat daerah.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.</li> </ul> |

### 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025-2029**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan          | Tujuan                                                                             | Sasaran                                    | Indikator                                                                                | Target Tahunan |       |       |       |       |       | Ket. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                              |                                                                                    |                                            |                                                                                          | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial |                                            | Persentase penurunan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)                       | 1,2            | 1,32  | 1,59  | 1,68  | 1,8   | 1,92  |      |
|                                              |                                                                                    | Meningkatnya akses terhadap layanan sosial | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan sosial | 72,16          | 72,88 | 73,6  | 74,32 | 75,04 | 75,76 |      |
|                                              |                                                                                    |                                            | Persentase capaian SPM bidang sosial                                                     | 100            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |      |
|                                              |                                                                                    |                                            | Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah                                                     | 81,95          | 81,96 | 81,97 | 81,98 | 81,99 | 82,00 |      |

**Tabel 3.4**  
**Keselarasan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029**

| Kementerian Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                       | Kabupaten Jombang                                                                                   | Dinas Sosial Kabupaten Jombang                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan:</b><br><br>Meningkatkan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan melalui perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi, dan responsive                                                                                                                                 | <b>Tujuan:</b><br><br>Meningkatnya pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat miskin dan rentan yang inklusif                                            | <b>Tujuan:</b><br><br>Terciptanya SDM yang berkualitas dan Tingkat kesejahteraan sosial yang merata | <b>Tujuan:</b><br><br>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
| <b>Sasaran:</b><br><br>1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan<br>2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional<br>3. Mewujudkan penguatan tata keloja serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik | <b>Sasaran:</b><br><br>1. Meningkatkan fungsi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial<br>2. Meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap permasalahan sosial | <b>Sasaran:</b><br><br>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat                                 | <b>Sasaran:</b><br><br>Meningkatnya akses terhadap layanan sosial                                        |

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perubahan program dan kegiatan

##### 1. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

Merupakan sebuah seperangkat tujuan, sasaran dan indikator pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam mengentaskan kemiskinan. Secara global SDGs pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunan secara global. Ada 17 point penting dalam SDGs yakni terciptanya dunia dengan :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan tujuan SDGs dengan tujuan pembangunan nasional mempertegas posisi dan peranan bidang kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan sebesar 37,5% dan meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan

## 2. Pengentasan kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar 8,6 persen dari target 9,15 persen sehingga capaiannya

sebesar 108 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 110,57 ribu orang.

Pengentasan kemiskinan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Jombang yang menjadi sasaran program Dinas Sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan program pembinaan lingkungan sosial bidang sosial, dan program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, guna mengangkat derajat hidup mereka, diantaranya melalui bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) yang saat ini menjadi program prioritas nasional, bantuan sembako. Selain memberikan bantuan sosial, Dinas Sosial juga memberikan pembinaan dan pendidikan pelatihan bagi PPKS agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dengan kemandiriannya. Hal yang tidak kalah penting dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya keterpaduan data sehingga hanya ada satu data fakir miskin. Untuk mendapatkan data yang valid maka pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Sosial melakukan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait.

### 3. Penurunan stunting

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dengan kata lain stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Sasaran dari program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu melalui pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) atau family development session (FDS) kepada KPM PKH, selain pemberian bantuan tunai dan non tunai.

#### 4. Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang harus diwujudkan yaitu 1) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, 2) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, 3) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan 5) jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

#### 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Hakikat dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk pendayagunaan potensi dan sumberdaya unggulan yang ada di desa/kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Usaha ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas usaha ekonomi melalui penerapan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta teknologi tepat guna, meningkatkan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif yang berdaya saing dalam pemasaran. Dinas Sosial dalam rangka pengetasan kemiskinan salah satunya dengan optimalisasi KUBE bagi masyarakat miskin.

## b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 terdiri dari enam (6) program, lima belas (15) kegiatan, dan lima puluh tiga (52) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.25.172.214.207, naik sebesar Rp. 9.710.086.475 menjadi sebesar Rp. 34.882.300.682

### 1. Penambahan anggaran pada perubahan rencana kerja TA 2025, yaitu :

| Program                                              | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                       | Kenaikan Anggaran | Keterangan                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                             | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                   | 5.029.500         | Hr penanggung jawab pengelolaan keuangan                  |
|                                                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 1.048.800         | Pembelian bohlam                                          |
|                                                      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                   | Pengadaan sarana dan prasarana gedung akntor atau bangunan lainnya                 | 54.385.550        | Pengadaan kursi rapat, alat pendingin, sound system       |
|                                                      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | 19.706.300        | Biaya tambah daya listrik                                 |
|                                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 160.000.000       | Pemeliharaan pagar RPS, pembuatan canopi dan musholla RPS |
|                                                      |                                                                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.110.000         | Pemeliharaan laptop                                       |
| Program Rehabilitasi Sosial                          | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan permakanaan                                                             | 212.863.750       | Bantuan permakanaan pada lansia                           |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial              | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Fasilitasi bantuan kesejahteraan keluarga                                          | 9.296.610.550     | Pengadaan tanah dan fasilitasi sekolah rakyat             |
| Program penanganan bencana                           | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota                                                                                 | Penyediaan makanan                                                                 | 193.377.000       | Penyediaan paket sembako bagi korban bencana              |
|                                                      | Penyelenggaraan                                                                                                                                    | Koordinasi, sosialisasi dan                                                        |                   | Hr pendirian                                              |

| Program                                  | Kegiatan                                                              | Sub Kegiatan                                                                   | Kenaikan Anggaran     | Keterangan           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                          | pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota | pelaksanaan taruna siaga bencana                                               | 29.990.000            | DU bagi tagana       |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota             | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 50.000.0001           | Penbuatan kijing TMP |
| <b>JUMLAH</b>                            |                                                                       |                                                                                | <b>10.478.121.451</b> |                      |

2. Pengurangan anggaran pada perubahan rencana kerja TA 2025, yaitu :

| Program                                         | Kegiatan                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                    | Pengurangan Anggaran | Keterangan         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                 | 3.778.000            | Efisiensi anggaran |
|                                                 | Administrasi keuangan perangkat daerah                                 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD                                   | 4144000              |                    |
|                                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                                          | 11400000             |                    |
|                                                 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah    | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 54.525.151           |                    |
| Pemberdayaan sosial                             | Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota                      | Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang            | 2.580.375            |                    |
|                                                 | Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota | Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota                               | 9.466.050            |                    |
|                                                 |                                                                        | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota                   | 5.490.105            |                    |
|                                                 |                                                                        | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota                    | 4.297.400            |                    |
|                                                 |                                                                        | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelem bagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota     | 6.723.670            |                    |

| Program                         | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Pengurangan Anggaran | Keterangan |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                 |                                                                                                                                                    | Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)                                                       | 880.125              |            |
| Rehabilitasi Sosial             | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                                                                      | 56.905.750           |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | pembrian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                                        | 5.000.000            |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat | 400.000              |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                                                      | 6.880.000            |            |
|                                 | Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza                                          | pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                                       | 8.535.000            |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                                                      | 6.027.500            |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                                                                      | 10.702.500           |            |
| Perlindungan dan jaminan sosial | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                                                                        | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                                                                                          | 33.956.750           |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                                                                                   | 10.310.000           |            |
|                                 |                                                                                                                                                    | fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat                                                                                                            | 71.421.000           |            |
| Penanganan Bencana              | Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terrhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota                                                             | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana                                                                                                 | 4.611.600            |            |
| <b>JUMLAH</b>                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | <b>318.034.976</b>   |            |



3. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang TA 2025 semula sebesar Rp. 25.172.214.207 dan pada PAK sebesar Rp. 34.882.300.682 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 9.710.086.475,-, dengan rincian sebagai berikut :

| No              | Program                                        | Anggaran<br>sebelum<br>perubahan | Anggaran<br>setelah<br>perubahan | +/-           |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1               | Penunjang urusan<br>pemerintah kabupaten/ kota | 5.190.631.859                    | 5.362.064.858                    | 171.432.999   |
| 2               | Pemberdayaan Sosial                            | 1.381.611.750                    | 1.352.174.025                    | (29.437.725)  |
| 3               | Rehabilitasi Sosial                            | 1.776.349.350                    | 1.894.762.350                    | 118.413.000   |
| 4               | Perlindungan dan Jaminan<br>Sosial             | 16.196.513.388                   | 25.377.436.188                   | 9.180.922.800 |
| 5               | Penanganan Bencana                             | 522.799.700                      | 741.555.100                      | 218.755.400   |
| 6               | Pengelolaan taman makam<br>pahlawan            | 104.308.160                      | 154.308.161                      | 50.000.001    |
| Jumlah Anggaran |                                                | 25.172.214.207                   | 34.882.300.682                   | 9.710.086.475 |

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perubahan rencana kerja Dinas Sosial tahun 2025 melakukan penyesuaian, sehingga mempunyai enam (6) program, lima belas (15) kegiatan dan lima puluh tiga (52) sub kegiatan. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial**  
**Tahun 2025**

| No | Program / Kegiatan                                                               | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|    | Program: penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                     | Kab Jombang | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                                                                                                                          | 100 %          | 5.190.631.859              | 5.362.064.858              | 171.432.999 |
|    | Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah      | Kab Jombang | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan                                                                       | 100 %          | 112.067.950                | 108.289.950                | (3.778.000) |
|    | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                  | Kab Jombang | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | 3 dokumen      | 8.077.950                  | 4.299.950                  | (3.778.000) |
|    | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Kab Jombang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 laporan      | 103.990.000                | 103.990.000                | 0           |
|    | Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah                                  | Kab Jombang | Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                | 100 %          | 3..711.547.214             | 3.712.432.714              | 885.500     |
|    |                                                                                  |             | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                                                                | 100 %          |                            |                            |             |
|    | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                | Kab Jombang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 19 orang/bulan | 3.517.281.864              | 3.517.281.864              |             |
|    | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                 |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi                                                                                                                  | 12 dokumen     | 181.944.000                | 186.973.500                | 5.029.500   |

| No | Program / Kegiatan                                                            | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    |                                                                               |             | Keuangan SKPD                                                                                                      |                |                            |                            |              |
|    | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                   | Kab Jombang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan      | 3.235.350                  | 3.235.350                  | -            |
|    | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD | Kab Jombang | Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan/ semester SKPD yang disusun                                            | 17 laporan     | 9.086.000                  | 4.942.000                  | (4.144.000)  |
|    | Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah                          | Kab Jombang | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian                                                                      | 100%           | 11.400.000                 | -                          | (11.400.000) |
|    | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                        | Kab Jombang | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                                          | 19 paket       | 11.400.000                 | -                          | (11.400.000) |
|    | Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah                                 | Kab Jombang | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                                            | 100 %          |                            |                            |              |
|    | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerapan bangunan kantor              | Kab Jombang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 8 paket        | 5.602.100                  | 6.650.900                  | 1.048.800    |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                  | Kab Jombang | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                     | 10 paket       | 17.380.900                 | 17.380.900                 | -            |
|    | Penyediaan peralatan rumah tangga                                             | Kab Jombang | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang                                                                           | 1 paket        | 1.920.000                  | 1.920.000                  | -            |

| No | Program / Kegiatan                                                          | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|    |                                                                             |              | disediakan                                                                             |                |                            |                            |            |
|    | Penyediaan bahan logistic kantor                                            | Kab Jombang  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                     | 2 paket        | 99.805.000                 | 99.805.000                 | -          |
|    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                   | Kab Jombang  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 5 paket        | 10.871.700                 | 10.871.700                 | -          |
|    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | Kab Jombang  | Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                 | 12 dokumen     | 5.556.000                  | 5.556.000                  | -          |
|    | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                        | Kab Jombang  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | 12 laporan     | 86.490.500                 | 86.490.500                 | -          |
|    | Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Jombang | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                           | 100%           | 117.030.500                | 171.416.050                | 54.385.550 |
|    | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya          | Kab. Jombang | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 49 unit        | 117.030.500                | 171.416.050                | 54.385.550 |
|    | Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah               | Kab Jombang  | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah                                | 100%           | 568.376.780                | 588.083.080                | 19.706.300 |
|    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                     | Kab Jombang  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan     | 127.800.000                | 127.800.000                | -          |

| No | Program / Kegiatan                                                                                                 | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Kab. Jombang | Jumla laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                    | 12 laporan     | 440.576.780                | 460.283.080                | 19.706.300   |
|    | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                     | Kab Jombang  | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                                      | 100 %          | 442.583.215                | 553.168.064                | 110.584.849  |
|    | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kab Jombang  | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit         | 41.610.000                 | 41.610.000                 | -            |
|    | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan    | Kab Jombang  | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya  | 36 unit        | 251.574.971                | 197.049.820                | (54.525.151) |
|    | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Kab Jombang  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | 1 unit         | 123.218.244                | 283.218.244                | 160.000.000  |
|    | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan                                          | Kab Jombang  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi        | 45 unit        | 26.180.000                 | 31.290.000                 | 5.110.000    |
|    | Program pemberdayaan sosial                                                                                        | Kab Jombang  | Persentase SDM Kesos tersertifikasi                                                                    | 42,3%          | 1.381.611.750              | 1.352.174.025              | (29.437.725) |
|    |                                                                                                                    |              | Persentase LKS yang terakreditasi                                                                      | 7,6%           |                            |                            |              |

| No | Program / Kegiatan                                                                                   | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    | Kegiatan pengumpulan sumbangan dalamdaerah kabupaten/kota                                            | Kab Jombang | Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan atau UGB yang dikeluarkan<br>Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan atau undian gratis berhadiah yang dikeluarkan | 75 %           | 13.037.500                 | 10.457.125                 | - 2.580.375  |
|    | Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang | Kab Jombang | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang                                            | 15 dokumen     | 13.037.500                 | 10.457.125                 | (2.580.375)  |
|    | Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota                      | Kab Jombang | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial mendapatkan peningkatan SDM                                                                                           | 87,1 %         | 1.368.574.250              | 1.341.716.900              | (26.857.350) |
|    | Peningkatan kemampuan potensi pekerjaan sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota                  | Kab Jombang | Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota                                                                      | 310 orang      | 270.804.500                | 261.338.450                | (9.466.050)  |
|    | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota        | Kab Jombang | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota                                         | 21 orang       | 151.051.600                | 145.561.495                | (5.490.105)  |
|    | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan                        | Kab Jombang | Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota                                                                                                | 160 keluarga   | 40.490.000                 | 36.192.600                 | (4.297.400)  |

| No | Program / Kegiatan                                                                                                                                          | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
|    | kabupaten/kota                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                          |                |                            |                            |             |
|    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten-Kota                                                  | Kab Jombang | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota                                                                               | 87 lembaga     | 892.224.400                | 885.500.730                | (6.723.670) |
|    | Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)                                                     | Kab Jombang | Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/ kota                         | 35 sertifikat  | 14.003.750                 | 13.123.625                 | (880.125)   |
|    | Program Rehabilitasi sosial                                                                                                                                 | Kab Jombang | persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi                          | 6,3 %          | 1.776.349.350              | 1.894.762.350              | 118.413.000 |
|    |                                                                                                                                                             |             | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial yang berhasil direhabilitasi                                                                | 100%           |                            |                            |             |
|    | Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | Kab Jombang | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 100 %          | 1.565.750.450              | 1.709.428.450              | 143.678.000 |



| No | Program / Kegiatan                                                                                                                                 | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                      | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    | Penyediaan permakanan                                                                                                                              | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/ kota                              | 460 orang      | 1.145.750.000              | 1.358.613.750              | 212.863.750  |
|    | Penyediaan sandang                                                                                                                                 | Kab Jombang | Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/ kota                                      | 120 orang      | 40.858.300                 | 40.858.300                 | -            |
|    | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/ kota                                             | 42 orang       | 58.250.000                 | 58.250.000                 | -            |
|    | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                                                                                           | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota                                                                | 100 orang      | 139.553.500                | 82.647.750                 | (56.905.750) |
|    | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                            | Kab Jombang | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/ kota                                                                | 130 orang      | 136.050.000                | 131.050.000                | (5.000.000)  |
|    | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan | Kab Jombang | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak erlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan | 70 orang       | 27.903.650                 | 27.503.650                 | (400.000)    |

| No | Program / Kegiatan                                                                                                                | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    | Masyarakat                                                                                                                        |             | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                             |                |                            |                            |              |
|    | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                          | Kab Jombang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 50 orang       | 17.385.000                 | 10.505.000                 | (6.880.000)  |
|    | Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti | Kab Jombang | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial yang direhabilitasi                  | 100 %          | 210.598.900                | 185.333.900                | (25.265.000) |
|    | Penyediaan sandang                                                                                                                | Kab Jombang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota | 70 orang       | 27.349.000                 | 27.349.000                 | -            |
|    | Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti                                                                                     | Kab Jombang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota    | 70 orang       | 24.500.000                 | 24.500.000                 | -            |
|    | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                           | Kab Jombang | Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota                            | 270 orang      | 123.606.150                | 115.071.150                | (8.535.000)  |
|    | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                          | Kab Jombang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan                                                                           | 50 orang       | 12.625.000                 | 6.597.500                  | (6.027.500)  |

| No | Program / Kegiatan                                                    | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                       | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|    |                                                                       |             | Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                |                            |                            |               |
|    | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                              | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota | 50 orang       | 22.518.750                 | 11.816.250                 | (10.702.500)  |
|    | Program perlindungan dan jaminan sosial                               | Kab Jombang | Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan sosial            | 26%            | 16.196.513.388             | 25.377.436.188             | 9.180.922.800 |
|    |                                                                       |             | Persentase data terpadu kesejahteraan sosial yang valid                                 | 67,5%          |                            |                            |               |
|    |                                                                       |             | Persentase masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan jaminan sosial                 | 86,5%          |                            |                            |               |
|    | Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota | Kab Jombang | Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS                        | 100 %          | 16.196.513.388             | 25.377.436.188             | 9.180.922.800 |
|    |                                                                       |             | Persentase keluarga miskin dan rentan dalam DTKS yang menerima bantuan sosial           | 79,1%          |                            |                            |               |
|    |                                                                       |             | Persentase penerima bantuan pengembangan ekonomi masyarakat                             | 100 %          |                            |                            |               |
|    | Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota                 | Kab Jombang | Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang didata                          | 685 orang      | 273.966.000                | 240.009.250                | (33.956.750)  |
|    | Pengelolaan data fakir                                                | Kab         | Jumlah keluarga yang                                                                    | 662.028        |                            |                            |               |

| No | Program / Kegiatan                                                          | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|    | miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                        | Jombang     | mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/ kota                                                                                                                  | keluarga       | 22.584.500                 | 12.274.500                 | (10.310.000)  |
|    | Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga                            | Kab Jombang | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial                                                                                                | 17.270 orang   | 15.605.131.338             | 24.901.741.888             | 9.296.610.550 |
|    | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat                          | Kab Jombang | Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/ kota                                                                           | 140 orang      | 294.831.550                | 223.410.550                | (71.421.000)  |
|    | Program bencana                                                             | Kab Jombang | Persentase kejadian bencana yang tertangani                                                                                                                           | 100 %          | 522.799.700                | 741.555.100                | 218.755.400   |
|    |                                                                             |             | Persentase desa siaga bencana yang aktif                                                                                                                              | 15,3%          |                            |                            |               |
|    | Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota | Kab Jombang | Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial                                                                                                        | 100 %          | 370.010.200                | 563.387.200                | 193.377.000   |
|    | Penyediaan makanan                                                          | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenang kabupaten/ kota                                                 | 7900 orang     | 298.285.200                | 491.662.200                | 193.377.000   |
|    | Penyediaa sandang                                                           | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapannya lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenanangan kabupaten/ kota | 100 orang      | 36.000.000                 | 36.000.000                 | -             |

| No | Program / Kegiatan                                                                              | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                         | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|    | Penyediaan tempat penampungan pengungsi                                                         | Kab Jombang | Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/ kota                                                                      | 1 unit         | 9.350.000                  | 9.350.000                  | -            |
|    | Penanganan khusus kelompok rentan                                                               | Kab Jombang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 200 orang      | 16.540.000                 | 16.540.000                 | -            |
|    | Pelayanan dukungan pskososial                                                                   | Kab Jombang | Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/ kota                           | 200 orang      | 9.835.000                  | 9.835.000                  | -            |
|    | Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota | Kab Jombang | Persentase desa /kelurahan siaga bencana                                                                                  | 13,1 %         | 152.789.500                | 178.167.900                | 25.378.400   |
|    |                                                                                                 |             | Persentase Taruna Siaga Bencana (tagana) yang aktif                                                                       | 100%           |                            |                            |              |
|    | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana                                   | Kab Jombang | Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota | 40 kampung     | 32.829.500                 | 28.217.900                 | ( 4.611.600) |
|    | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana                                    | Kab Jombang | Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten / kota   | 36 orang       | 119.960.000                | 149.950.000                | 29.990.000   |
|    | Program pengelolaan taman makam pahlawan                                                        | Kab Jombang | Persentase sapras taman makam pahlawan (TMP)                                                                              | 95 %           | 104.308.160                | 154.308.161                | 50.000.001   |

| No          | Program / Kegiatan                                                             | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target Capaian | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Naik/Turun    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|             |                                                                                |             | yang sesuai standar                                                                                                   |                |                            |                            |               |
|             | Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota            | Kab Jombang | prasarana taman makam pahlawan nasional (TMPN) dalam kondisi baik                                                     | 95%            | 104.308.160                | 154.308.161                | 50.000.001    |
|             | Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota | Kab Jombang | umlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 dokumen      | 89.449.160                 | 139.449.161                | 50.000.001    |
|             | Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota                      | Kab Jombang | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota                                 | 1 makam        | 14.859.000                 | 14.859.000                 | -             |
| J U M L A H |                                                                                |             |                                                                                                                       |                | 25.172.214.207             | 34.882.300.682             | 9.710.086.475 |

## **BAB V P E N U T U P**

### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja**

Perubahan anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 mencerminkan penajaman prioritas kebijakan untuk menjawab tantangan kemiskinan dan keterbatasan akses layanan sosial bagi masyarakat rentan. Kenaikan signifikan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas intervensi sosial, termasuk melalui fasilitasi dan pengadaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk inovasi layanan pendidikan berbasis sosial. Di sisi lain, penyesuaian pada program pemberdayaan sosial menuntut optimalisasi sumber daya agar efektivitas program tetap terjaga.

### **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat, dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga

diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 yang menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

### 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijaksanaannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan yakni:

| No | Rencana Tindak Lanjut                                            | Tujuan                                                             | Bentuk Kegiatan                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Optimalisasi pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan sasaran | Pemutakhiran DTKS dan PPKS; verifikasi lapangan penerima bantuan; pelaksanaan Sekolah Rakyat |



| No | Rencana Tindak Lanjut                    | Tujuan                                                             | Bentuk Kegiatan                                                                              |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Penguatan koordinasi lintas sektor       | Mendorong sinergi pelaksanaan program dan efisiensi sumber daya    | Rapat koordinasi, FGD, MoU dengan OPD teknis, dan LKS                                        |
| 3  | Peningkatan kapasitas SDM pelaksana      | Meningkatkan kualitas pelayanan sosial                             | Pelatihan petugas dan pendamping sosial, bimtek fasilitator Sekolah Rakyat                   |
| 4  | Integrasi dan efisiensi antar program    | Menghindari duplikasi dan memperkuat capaian output                | Sinkronisasi RKA subkegiatan, dan RPJMD                                                      |
| 5  | Penguatan sistem monitoring dan evaluasi | Meningkatkan akuntabilitas dan pengambilan kebijakan berbasis data | Pengembangan instrumen monev, kunjungan lapangan, dashboard pelaporan kegiatan               |
| 6  | Penyusunan regulasi pendukung            | Menjamin legalitas dan keberlanjutan program                       | Penyusunan SOP Sekolah Rakyat, surat keputusan kepala dinas, dan rekomendasi regulasi daerah |

Jombang, 30 Juni 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN JOMBANG**



**HARI PURNOMO, AP, M.E**

Pembina Utama Muda

NIP. 19751110 199501 1 002